

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembangunan kawasan konservasi penyu di Desa Apar menyebabkan perubahan baik itu secara fisik ataupun mental masyarakat. Perubahan fisik Pantai Apar yang awalnya pesisir pantai yang hanya berupa hutan bakau dan kini telah di tata sebagai daerah kunjungan wisata. Perubahan fisik pantai menyebabkan perubahan pola pikir masyarakat lokal dalam memanfaatkannya. Pantai yang pada dahulunya hanya di gunakan sebagai lahan peternakan dan tempat berburu hewan-hewan endemik air payau sekarang telah berubah sebagai daerah wisata.

Kawasan konservasi penyu membuka kepada siapa saja yang dapat memanfaatkannya. Sejauh ini masyarakat lokal menangkap peluang dengan berdagang di areal wisata, menjadi pegawai pengelola konservasi, penyedia jasa parkir, sampai menyewakan perahu bagi pengunjung. Masyarakat pesisir tidak lagi bergantung kepada sektor perikanan semata. Mereka beradaptasi dari setiap perubahan yang datang.

Pembangunan kawasan pariwisata di Desa Apar menimbulkan konflik yang bersifat *laten* antara masyarakat lokal dan Pemerintah Kota Pariaman. konflik bermula ketika pemerintah tidak konsisten dengan kesepakatan awal yakni: (1) keuntungan dari pariwisata dibagi dua dengan Anak Nagari Desa Apar, dan yang ke (2) pembangunan Kawasan konservasi diluar kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah cenderung menggunakan kebijakan dengan sistem *top down* dalam pembangunan pariwisata di Apar tanpa menghormati karifan lokal masyarakat dalam mengambil keputusan.

Pembangunan kawasan konservasi menimbulkan konflik horizontal yang terjadi antara sesama anggota masyarakat. Dalam kasus Desa Apar konflik terjadi

antara Para *niniak Mamak* dan *kemenakan* (pemuda). Awal persoalan telah terjadi saat proses negosiasi awal dalam pembangunan kawasan ekowisata itu, karena para *mamak* (pimpinan informal dan formal pemerintahan desa) dengan kewenangan yang dimilikinya melakukan negosiasi dengan pemerintah Kota Pariaman tanpa mendengar aspirasi para *kemenakan*. Akibatnya ketika terjadi konflik antara *kemenakan* (pemuda) dengan pengelola kawasan ekowisata *mamak* tidak berwibawa meredakan gejolak. Mereka tidak melakukan antisipasi, karena disadari tidak akan efektif setelah *belangnya* diketahui oleh para *kemenakan*.

Berkembangnya sektor wisata di Desa Apar turut menambah pencemaran lingkungan terutama yang disebabkan oleh sampah. Pengelolaan sampah di pantai Apar kurang efektif karena; (1) kurangnya sosialisasi pihak pengelola wisata, (2) kurangnya kesadaran wisatawan dalam membuang sampah pada tempat yang telah di tentukan, (3) kebiasaan masyarakat setempat dalam membakar sampah sehingga menimbulkan pencemaran.

Kegiatan konservasi penyu telah merubah tabiat masyarakat dalam memperlakukan hewan penyu. Masyarakat lokal tidak lagi melakukan perburuan telur penyu untuk di konsumsi atau di jual bebas di pasaran. Dengan adanya kawasan konservasi di Desa Apar telah membuka kesadaran masyarakat Kota Pariaman akan terancamnya habitat penyu pada saat ini.

B. Saran

Pola Pengembangan Pariwisata harus bertumpu pada Model Pemberdayaan Masyarakat didasarkan asumsi-asumsi tentang masyarakat Desa Apar dan peluang pengembangan wisatanya. Perlu dikembangkan sebuah model pengembangan pariwisata terpadu yang bertumpu pada model pemberdayaan

masyarakat. Dasar-dasar pertimbangan model adalah aspek-aspek (1) konservasi lingkungan dan, (2) pemberdayaan masyarakat.

Direkomendasikan bahwa pengembangan pariwisata memerlukan perangkat politik, oleh sebab itu *political will* dari pemerintah Kota Pariaman dalam upaya mengembangkan potensi perlu direalisasikan melalui kewenangan legislatif dan eksekutif dan dukungan peran serta masyarakat luas. pengembangan kepariwisataan perlu mendapatkan perhatian terutama mengenai kearifan lokal daerah setempat . Dalam pelaksanaan program-program kepariwisataan di Kota Pariaman sangat perlu adanya sinergi secara terpadu pemerintah dan masyarakat lokal. Pantai Apar memiliki potensi yang berkualifikasi dalam pengembangan ekowisata. Untuk itu, dalam mengembangkan kawasan konservasi penyu di Pantai Apar harus diperhatikan sebagai tanggung jawab ekologis, sosio-kultural, spiritual dan diabdikan untuk kemaslahatan bersama. Perlu revitalisasi, diversifikasi, dan pembangunan kawasan baru kepariwisataan yang melibatkan pelaku kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat melalui program-program kepariwisataan berbasis masyarakat.

